

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT
KABUPATEN MUNA TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MUNA**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ARMAN NURMINTO
NIM : 126232122**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT
KABUPATEN MUNA TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MUNA**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ARMAN NURMINTO
NIM : 126232122**

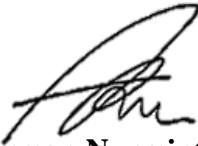
**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT
KABUPATEN MUNA TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MUNA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Arman Nurminto
126232122

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Ivan Kanel, SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPMA

ABSTRAK

Analisis Peran dan Fungsi Audit Internal Inspektorat Kabupaten Muna Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Muna

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Kabupaten Muna memiliki status rendah, dan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 22%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Muna dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk hambatan dalam melakukan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mendeskripsikan secara rinci kegiatan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Muna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Muna telah melakukan fungsi pengawasan cukup baik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Namun, masih terdapat hambatan yang dihadapi dan perlu perbaikan agar pencapaian tujuan lebih efektif.

Kata Kunci: Pengawasan, Audit Internal, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Analysis of the Role and Functions of Internal Audit by the Muna Regency Inspectorate in Implementing Local Government Affairs in Muna Regency

Based on the assessment results of the Regional Government Implementation Report (LPPD), Muna Regency holds a low status, with a Monitoring Center for Prevention (MCP) index of 22%. This research aims to identify the roles and functions of the Muna Regency Inspectorate in supervising the administration of local government affairs, including the obstacles faced during supervision. The research method used is descriptive with a qualitative approach, describing in detail the activities carried out by the Muna Regency Inspectorate. The research results show that the Muna Regency Inspectorate has performed its supervisory function quite well in the administration of local government affairs. However, there are still obstacles encountered and improvements needed for more effective goal achievement.

Keywords: Supervision, Internal Audit, Regional Government.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Ak., CACP., CPI., CA., CPA. selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Ivan Kanel, SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPMA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu selama proses perkuliahan.
6. Seluruh keluarga, teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2024

Arman Nurminto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.....	3
2.2 Pemerintah, Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.....	5
2.3 Pengawasan	6
2.4 Pengawasan Internal	7
2.5 Pengawasan Internal Pemerintah.....	8
2.6 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Muna	9
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1 Jenis Penelitian	11
3.2 Lokasi Penelitian	11
3.3 Informan Penelitian	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data	11
3.5 Teknik Analisis Data	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Menilai Kinerja Pengendalian Manajemen	13
4.2 Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko	13
4.3 Mengidentifikasi Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	15
4.4 Pertanggungjawaban dan Perlindungan Terhadap Aset	15
4.5 Menentukan Keandalan Data/Informasi.....	16
4.6 Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan.....	17
4.7 Memberikan Jasa Konsultansi	19

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	21
5.1	Simpulan.....	21
5.2	Saran	21
REFERENSI.....		23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan	4
Tabel 4.1	Daftar Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang Dilakukan <i>Probitry Audit</i>	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai kendala, yang mengakibatkan pengawasan internal belum sepenuhnya berfungsi sebagai *quality assurance*. Hal ini berarti pengawasan tersebut belum mampu menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fokus utama pengawasan seharusnya berorientasi pada tindakan pencegahan, yaitu mengantisipasi atau meminimalisir adanya kesalahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar kesalahan yang telah terjadi sebagai pembelajaran untuk mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Untuk mengoptimalkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan peran pengawasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengawasan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih.

Pemerintah Kabupaten Muna merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan daerah otonom. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilakukan oleh perangkat daerah. Untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel maka dibentuk inspektorat sebagai perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Tahun 2023 diketahui inspektorat merencanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 3 laporan, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 2 laporan, Reviu Laporan Keuangan sebanyak 9 laporan serta pengawasan dengan tujuan tertentu sebanyak 7 laporan. Berdasarkan perencanaan tersebut terdapat perangkat daerah yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat.

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri diketahui kondisi Pemerintah Kabupaten Muna masih kategori rendah. Selain itu, indeks *Monitoring Center for Prevention*

(MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten Muna masih rendah dengan indeks 22%. Berdasarkan informasi awal, Inspektorat Kabupaten Muna dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan belum optimal.

Pengawasan yang seharusnya bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah masih belum mampu sepenuhnya berperan sebagai *quality assurance* dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian terkait hal ini “Analisis peran dan fungsi audit internal inspektorat Kabupaten Muna terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Muna”.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Muna dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk hambatan dalam melakukan pengawasan.

REFERENSI

- Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. (2006). *Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyawan, Rahman. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Saefulla, dan Ernie. (2005). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Siagian, Sondang P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan Teori dan Amplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara